

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA (PKK) DI KABUPATEN PANDEGLANG

Ajat Suhrajat

ajat.suhrajat@gmail.com

Prodi Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya implementasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kepada Lembaga Nonformal di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan member check yang dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik Van Metter & Van Horn, Deddy Mulyadi (2016). Teknik analisis data menggunakan Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang masih belum optimal. Implementasi yang dilakukan oleh Lembaga Nonformal masih bersifat general dan lebih kepada orientasi rutinitas kerja pemerintahan. Kondisi tersebut menghambat proses implementasi kepada masyarakat yang belum memiliki skill dalam hal bekerja. Peneliti merekomendasikan agar Lembaga Nonformal dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang untuk memberikan bantuan motivasi dan dukungan secara berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan keahlian. Kedepannya diharapkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang dapat berkurang secara signifikan.

Kata Kunci: implementasi, program, PKK

ABSTRACT

This study discusses the Implementation of the Employment Skills Education Program (PKK) Policy in Pandeglang Regency. The purpose of the study was to determine the implementation efforts carried out by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology through the Directorate of Courses and Training, Directorate General of Vocational Education, to Non-formal Institutions in Pandeglang Regency. This study uses a descriptive qualitative approach. Determination of informants using purposive sampling technique. Data collection techniques through observation, direct interviews and documentation. Testing the validity of the data using triangulation of data sources and member checks associated with the theory of public policy implementation Van Metter & Van Horn, Deddy Mulyadi (2016). Data analysis technique using Miles and Hubberman. The results showed that the implementation of the Employment Skills Education Program (PKK) policy in Pandeglang Regency was still not optimal. The implementation carried out by non-formal institutions is still general in nature and is more oriented to the routine

work of government. This condition hinders the implementation process for people who do not have the skills to work. The researcher recommends that Non-formal Institutions and the Department of Education and Culture of Pandeglang Regency to provide motivational assistance and ongoing support to people who need expertise. In the future, it is hoped that the open unemployment rate in Pandeglang Regency can be reduced significantly.

Key Words : Implementation, Program, PKK

PENDAHULUAN

Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan sebagai salah satu instrumen penting dalam kemajuan sebuah bangsa, pendidikan dianggap penting dikarenakan memberikan efek perubahan pola pikir masyarakat yang lebih konstruktif dalam mendorong pembangunan yang terencana dan memiliki dampak yang lebih masif.

Pendidikan di Indonesia sendiri merupakan pendidikan yang berjenjang dari yang terendah dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, serta Perguruan Tinggi yang dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka memperoleh pengetahuan, kecakapan, serta kreatifitas atau inovasi. Ketidakmampuan masyarakat dalam

mengakses pendidikan hingga kepada jenjang yang lebih tinggi mengakibatkan rendahnya pengetahuan, kecakapan dan kreativitas mereka dalam mengakses lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan permasalahan pengangguran belum juga bisa terselesaikan.

Pengangguran sampai saat ini merupakan permasalahan serius bangsa Indonesia, total penduduk Indonesia pada Februari 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010–2035 diperkirakan sebanyak 267,05 juta orang, dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 196,46 juta orang, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 mencapai 136,18 juta orang, bertambah sekitar 5,17 juta orang (3,95 persen) dibandingkan angkatan kerja Agustus 2019 sebesar 131,01 juta orang, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2020 sebesar 129,37 juta orang. Dengan demikian jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2020 mencapai 6,82 juta orang, sementara tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2020 mencapai 5,01 persen, pada Februari 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat, yaitu 7,73 persen, sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali sebesar 1,19 persen. Sementara itu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan menyerap 38,11 juta orang (29,46

persen) pekerja, sementara lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya sebesar 310 ribu orang (0,24 persen) pekerja. (Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, BPS-RI Februari 2020). Pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini, terjadi kebebasan distribusi arus barang, jasa, dan sumber daya manusia antar negara ASEAN. Kondisi seperti ini merupakan tantangan

berat tetapi sekaligus terbukanya berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga kerja dan yang memiliki daya saing. Mereka dapat memanfaatkan dan mengakses peluang kerja yang ada, bukan hanya pada skala nasional tetapi juga di negara-negara anggota ASEAN. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah:

Gambar 1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (persen), Februari 2018–Februari 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 2021

Berdasarkan gambar diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,63 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat Diploma I/II/III (6,89 persen). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau

menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 2,65 persen. Pertumbuhan pengangguran sendiri mengalami laju yang fluktuatif, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI) pengangguran Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami penurunan:

Tabel 1
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2018–
Februari 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2018	Februari 2019	Februari 2020	Perubahan 1 Tahun (Feb 2018–Feb 2019)	
1	2	3	4	5	6
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	190,59	193,55	196,46	2,91	1,50
Angkatan Kerja	131,55	133,94	136,18	2,24	1,67
Bekerja	124,54	127,07	129,36	2,29	1,80
Pengangguran	7,01	6,87	6,82	-0,05	-0,73
Bukan Angkatan Kerja	59,04	59,61	60,28	0,67	1,12
Sekolah	15,24	15,61	16,15	0,54	3,46
Mengurus Rumah Tangga	36,08	36,01	36,79	0,78	2,17
Lainnya	7,72	7,99	7,34	-0,65	-8,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 2021

Berdasarkan tabel 1 diatas, bahwa pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah pengangguran mencapai 7,01 juta jiwa, di tahun 2019 sebesar 6,87 juta jiwa, dan pada tahun 2020 sebesar 6,82 juta jiwa. Namun dengan demikian pengangguran di Indonesia masih terbilang tinggi.

Dalam mengatasi persoalan pengangguran ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya kebijakan salah satu upaya tersebut dengan mendorong program pelayanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang mana program ini dirasa oleh pemerintah sebagai pilihan yang tepat untuk pengentasan pengangguran sekaligus kemiskinan.

Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) merupakan program layanan

pendidikan melalui kursus dan pelatihan yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan kompeten pada bidang keterampilan sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pada program ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal peluang-peluang kerja yang terbuka pada era MEA. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) merupakan salah satu wujud program penyalarsan kursus dan pelatihan dengan kebutuhan kompetensi kerja pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan kewirausahaan. Melalui program ini, peserta didik dibekali keterampilan sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan dikembangkan etos kerjanya. Setelah menyelesaikan program, peserta didik dibantu dan dibimbing oleh lembaga penyelenggara program untuk mengakses lapangan kerja yang tersedia sampai mereka dapat

bekerja pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Dalam upaya menyiapkan peserta didik kursus dan pelatihan menjadi tenaga kerja baru yang terampil/kompeten, memiliki etos kerja dan daya saing tinggi, pemerintah melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menyiapkan bantuan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK).

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam melihat permasalahan terkait Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang peneliti memfokuskan pada beberapa permasalahan yang didapatkan setelah melakukan observasi lapangan, studi literasi online dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi masalah dalam Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang. Dalam berjalannya program pendidikan kecakapan kerja kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Pertama, Belum optimalnya pencapaian tujuan dari Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang. Hal ini tergambarkan dari jumlah data para pencari kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan yang ditempatkan, berikut jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang Sudah ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan di

Kabupaten Pandeglang (orang) tahun 2020. Kedua Belum memadainya sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang. Program Kecakapan Kerja (PKK) yang digagas Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki tujuan yang kaitannya dengan memotivasi Lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan peluang kerja dengan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan guna memberdayakan secara maksimal peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut.

Ketiga, Belum sesuainya lembaga pelaksana program dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pada proses pelaksanaan kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) maka dibutuhkan pelaksana kebijakan baik dari organisasi formal maupun nonformal yang memiliki karakteristik sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Pandeglang *Keempat*, Minimnya dukungan lembaga keterampilan dan pelatihan dalam mensukseskan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang. Didalam menjalankan sebuah program kebijakan maka dibutuhkan dukungan yang baik dari semua sektor publik dan privat, dalam hal program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) memperoleh dukungan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada di Kabupaten Pandeglang masih sangat minim dimana jumlah 7 lembaga pendidikan dan pelatihan yang terdaftar sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) tergolong sangat

sedikit. *Kelima* Kurang maksimalnya komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang. Keberhasilan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) tidak terlepas dari proses komunikasi dan koordinasi yang terbangun baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan serta yang mendapatkan manfaat dari sebuah kebijakan, maka dibutuhkan suatu upaya dalam rangka mengkomunikasikan program.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Implementasi Kebijakan Publik Van Metter & Van Horn (2016) Deddy Mulyadi (72:2016) yang meliputi enam indikator yaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, dan disposisi implementor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif juga karena pertimbangan metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada gambaran aktivitas Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan program pendidikan kecakapan kerja di wilayah Kabupaten Pandeglang. Untuk tujuan penelitian berupa pertanyaan yang ditanyakan melalui proses wawancara data yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasi secara kualitatif dengan studi literatur melalui tahap pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, yakni Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Metter & Van Horn, Deddy Mulyadi (72:2016). Teori tersebut memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan implementasi yang harus memperhatikan beberapa indikator yang satu dengan indikator lain sehingga saling memiliki keterkaitan guna mencapai keberhasilan proses implementasi secara baik. Adapun deskripsi data dalam penelitian ini bermaksud untuk menjadi jembatan bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah yakni bagaimana upaya Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambat upaya Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang dapat menjawab rumusan masalah. Adapun indikator-indikator yang dimaksud yaitu standar dan kebijakan (harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi). Sumber daya (kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia). Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivis (implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan

dikoordinasikan dengan instansi lain agar dapat tercapai keberhasilan yang diinginkan. Karakteristik agen pelaksana (sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan). Kondisi sosial, ekonomi dan politik (mencakup pada sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan). Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor (terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan). Kognisi (pemahaman terhadap suatu kebijakan). Intensitas (disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor).

Merujuk pada hasil penelitian, dalam konteks standar dan sasaran kebijakan maka secara menyeluruh dapat diketahui bahwa standarisasi kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang sesungguhnya telah dituangkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Program Pendidikan Kecakapan Kerja. Seluruh aktor yang melaksanakan atau terlibat dalam kebijakan tersebut untuk bersama-sama dengan masyarakat saling mengintegrasikan kebijakan tersebut menuju pada kondisi ideal yang dapat dicapai dalam Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang.

Kurangnya sumber daya pelaksana dalam pelaksanaan program PKK di

Kabupaten Pandeglang, dalam pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang terdapat 35 lembaga LKP, PKBM dan SKB yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan dan kursus, dimana dari 35 lembaga tersebut hanya 7 lembaga yang terdaftar sebagai penerima bantuan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), jumlah 7 lembaga ini tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja di Kabupaten Pandeglang sebanyak 11.955 orang. Kepala Bidang PAUD dan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menargetkan satu kecamatan 1 lembaga penyelenggara program pendidikan kecakapan kerja (PKK) tetapi pada tidak semua kecamatan terdapat lembaga pelatihan dan atau lembaga kursus yang menyelenggarakan program PKK ini.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pelatihan dan kursus dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, dalam pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) sosialisasi terhadap program sangat minim sehingga masih banyak masyarakat belum mengetahui, memahami dan mengakses program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), ini disebabkan oleh sosialisasi yang dilakukan secara umum baru sebatas sosialisasi formal yaitu menggunakan alat peraga sosialisasi seperti pemasangan spanduk di tempat lembaga penyelenggara program PKK, disisi lain ada sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan secara non-formal yang dilakukan lembaga pelatihan dan Kursus, namun masih kurang tersosialisasikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang juga kurang mensosialisasikan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) ini ini disebabkan oleh terbatasnya tugas Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang di dalam petunjuk teknis program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yaitu sebatas fasilitasi administrasi dan juga melakukan monitoring dan evaluasi.

Kondisi lingkungan sosial masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang, dalam pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang terkendala oleh kondisi sosial masyarakat Kabupaten Pandeglang yang secara tingkat pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagian besar masyarakatnya hanya mengenyam pendidikan sampai dengan tamat tingkat SD/MI/Sederajat sebesar 40.75 persen. Kondisi pendidikan yang rendah di Kabupaten Pandeglang memberi dampak negatif terhadap pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK). Dengan kondisi sosial yang demikian menjadikan kurang maksimalnya pelaksanaan program PKK di Kabupaten Pandeglang.

Terbatasnya peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, dalam pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang hanya memiliki peran dalam hal fasilitasi administrasi untuk program mulai dari pengajuan proposal oleh lembaga penyelenggara program PKK di Kabupaten Pandeglang dan peran dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) sementara dalam hal perencanaan, penetapan, pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tidak memiliki peran,

dikarenakan alur pengajuan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) langsung dari lembaga penyelenggara program kepada pemerintah pusat yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dalam Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang masih belum optimal. Hal ini mengacu kepada upaya-upaya implementasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dan lembaga yang masih bersifat menyeluruh dan lebih kepada orientasi rutinitas kerja pemerintahan. Kondisi tersebut pada akhirnya menghambat proses implementasi program pendidikan kecakapan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang yang seharusnya secara konsisten dan berkelanjutan, maka sasaran kebijakan yang hendak dituju akan dengan sendirinya tercapai dan keberlangsungan Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang pun dapat berjalan sesuai dengan harapan para pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga benefit yang muncul dalam implementasi tersebut dapat dirasakan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan masyarakat yang mengikuti program kecakapan kerja.

Keberhasilan implementasi kebijakan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang, berdasarkan analisa pada pembahasan bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan program

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang dinilai belum berjalan dengan baik dimana masih terdapat beberapa aspek yang masih belum berjalan optimal. Aspek ukuran dan tujuan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) belum berjalan dengan baik, kemudian aspek sumber daya yang ada pada program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) pada sumber daya pelaksana masih kurang, kemudian aspek karakteristik agen pelaksana program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) pada ketepatan program terhadap lembaga pelatihan dan kursus sebagai pelaksana belum sesuai dari segi yang mendapatkan bantuan program PKK dan juga tidak sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Kemudian aspek sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), dukungan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sudah berjalan dengan baik, sementara dukungan lembaga pelaksana belum baik atau masih minim. Kemudian aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), dalam hal komunikasi antar organisasi pelaksana sudah berjalan dengan baik, sementara dalam hal aktivitas pelaksana yaitu sosialisasi belum berjalan dengan baik. Kemudian terakhir aspek lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), dalam hal lingkungan ekonomi dan politik tidak memberi dampak pada program PKK, sementara pada lingkungan sosial berdampak pada pelaksanaan program PKK.

Faktor penghambat implementasi kebijakan program Pendidikan

Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang masih kurangnya sumber daya pelaksana dalam pelaksanaan program PKK di Kabupaten Pandeglang, masih kurangnya lembaga pelatihan dan kursus baik PKBM dan LKP yang mengakses program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pelatihan dan kursus, kondisi lingkungan sosial masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang, dan terbatasnya peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dalam perencanaan, penetapan dan pelaksanaan program PKK karena hanya memiliki peran monitoring dan evaluasi.

Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki implementasi kebijakan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang diantaranya melakukan komunikasi dan koordinasi melalui monitoring evaluasi dan juga fasilitasi administrasi dalam rangka memberikan kemudahan bagi lembaga pelatihan dan kursus mengakses program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang kepada Lembaga Pelatihan dan Kursus di Kabupaten Pandeglang. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan cara workshop, seminar atau mengundang calon peserta dalam sebuah kegiatan oleh lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Kursus di Kabupaten Pandeglang.

REKOMENDASI

1. Aspek sumber daya, perlunya dorongan pemerintah dalam meningkatkan jumlah dan juga memfasilitasi dalam pemenuhan syarat-syarat administratif lembaga

- pelatihan dan kursus seperti LKP, PKBM dan SKB yang ada di Kabupaten Pandeglang, agar tujuan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang bisa tercapai dengan baik.
2. Aspek Karakteristik agen pelaksana, perlunya keterlibatan Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dalam menyeleksi lembaga Pelatihan dan Kursus yang akan menjalankan program Pendidikan Kecakapan Kerja di Kabupaten Pandeglang agar lembaga pelatihan dan kursus yang mendapatkan bantuan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah lembaga yang layak yang didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. kemudian perlunya peran pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam mendorong lembaga pelatihan dan kursus yang bergerak di bidang pertanian mengingat potensi Kabupaten Pandeglang di bidang pertanian sangat besar.
 3. Aspek sikap/ kecenderungan (disposisi) para pelaksana, keterlibatan lembaga pelatihan dan kursus perlu didorong oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan partisipasi lembaga pelatihan dalam menyukseskan pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Pandeglang.
 4. Aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, meningkatkan sosialisasi baik yang dilakukan oleh lembaga pelaksana pelatihan dan kursus yang memperoleh program dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui perangkat dibawahnya untuk memaksimalkan sosialisasi, baik dengan menggunakan media-media promosi lainnya seperti brosur, melalui media sosial dan juga disampaikan dalam kegiatan-kegiatan serupa agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui, memahami isi program PKK dan juga mau mengakses program PKK tersebut.
 5. Aspek lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang melalui perangkat teknis dibawahnya mendorong untuk melakukan penyadaran pentingnya mengikuti pelatihan keterampilan yang ada di lembaga pelatihan dan kursus, serta mendorong pembentukan lembaga pelatihan dan kursus yang lebih banyak dengan berbagai bidang yang dilatihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta Bandung
- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta Bandung.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Gajah Mada Press
- Dwijowijoto, Nugroho. R. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Fuad Anis & Kandung S. Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian*

- Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Islamy, M. Irfan, 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava media.
- Moleong J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya
- Nugroho D, Riant. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana
- Subarsono, AG. 2005. *.Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPi.
- Wahab, Solichin. A. 2007. *.Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winardi, J., 2001. *Motivasi Dan Pemotivasian Dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo
- Sumber Artikel/Berita (Cetak/Online):**
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 2021
BPS Kabupaten Pandeglang 2021
Data Rekap PKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2021
Safrina, Dian. 2003. *Studi Formulasi Kebijakan, Yogyakarta: Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada*.
- Nadia Fitriana, (2020). *Pemberdayaan Perempuan melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Habiby Z, Fachrini (2018). *Evaluasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Rias Pengantin di Kabupaten Deli Serdang, Sumut*. S2 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta
- Peraturan Perundang-Undangan:**
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2021